



**SINGKAWANG
HEBAT!**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Singkawang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Singkawang yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Laporan Kinerja ini juga sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban serta dapat memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yaitu *“Terwujudnya pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi, komunikasi dan informasi”*.

Singkawang, Februari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ir. H. ASYIR A. BAKAR, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631010 199003 1 018



**SINGKAWANG
HEBAT!**



*Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tupoksi	2
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	12
5. Sumber Daya Keuangan	13
6. Sarana dan Prasarana	16
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENSTRA	17
1. Visi	17
2. Misi	19
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.....	19
B. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA	24
B. REALISASI ANGGARAN	52
BAB IV : PENUTUP	53
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
LAMPIRAN I :	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
LAMPIRAN II :	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



**SINGKAWANG
HEBAT!**



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, guna melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kota Singkawang menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 maka disusunlah Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang terdiri dari 3 Asisten, 9 Kepala Bagian, dan 27 Kepala Sub Bagian dan Sekretariat Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah Kota Singkawang, berlokasi di Jalan Firdaus Nomor



**SINGKAWANG
HEBAT!**



*Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022*

1 Singkawang 79123 Telp. (0562) 6300719 Faksimili (0562) 6300719
Email : setda@singkawangkota.go.id Website:
www.singkawangkota.go.id.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi menurut Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi Dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 102 Tahun 2021 Tentang, Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Adalah Terdiri Dari 3 Asisten, 9 Kepala Bagian, 2 Kepala Subbagian Dan 25 Kelompok Jabatan Fungsional Antara Lain Sebagai Berikut :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian :
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kepala Bagian Hukum yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian :
 - a. Kepala Bagian Umum yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Kepala Bagian Organisasi yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang membawahi Kepala Subbagian Protokol dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta



Tata Kerja Sekretariat Daerah, bahwa tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan dalam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Sekretaris Daerah, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah;
- b. penetapan sasaran strategis pemerintah daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah Kota Singkawang dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana berikut :

- ❖ **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan keasistenan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat meliputi bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain:

- a. penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat;



- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

✓ **Bagian Pemerintahan;**

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, serta kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, serta kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, serta kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan,



- administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pemerintahan terdiri dari kelompok Jabatan fungsional.

✓ **Bagian Kesejahteraan Rakyat;**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

✓ **Bagian Hukum;**



Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

- ❖ **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan keasistenan perekonomian dan pembangunan meliputi bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;



- c. penyusunan kebijakan daerah bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :**

✓ **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;**

Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pembinaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Perekonomian terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

✓ **Bagian Administrasi Pembangunan;**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang penyusunan program evaluasi dan pelaporan SETDA, penyusunan program pembangunan umum dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan umum.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- d. penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan program evaluasi dan pelaporan SETDA, penyusunan program pembangunan umum, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan umum;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan program evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, penyusunan program pembangunan umum, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.



✓ **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional



- ❖ **Asisten Administrasi Umum**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan keasistenan administrasi umum meliputi bidang organisasi dan pelayanan administratif meliputi umum, protokol dan komunikasi pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas :

- pelaksanaan kebijakan bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- penyusunan kebijakan daerah bidang organisasi;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang organisasi;
- penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang organisasi;
- penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah bidang organisasi dan pelayanan administratif meliputi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Asisten Administrasi Umum terdiri dari :**

✓ **Bagian Umum.**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan aset, rumah tangga dan perlengkapan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan aset, rumah tangga dan perlengkapan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan aset, rumah tangga dan perlengkapan;



- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan aset, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

✓ **Bagian Organisasi;**

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



✓ **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja bagian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :

- Sub Bagian Protokol;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang sampai dengan tahun 2022 berjumlah 92 orang tidak termasuk pegawai honor, sedangkan pejabat struktural berjumlah 40 orang.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang, dijabarkan menurut tingkat pendidikan, golongan dan Eselon sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	2020	2021	2022
1	S3	-	-	-



**SINGKAWANG
HEBAT!**



Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022

2	S2	16	22	20
3	S1/D4	47	41	37
4	D3	7	5	13
5	SLTA	31	24	20
6	SMP	1	2	2
7	SD	1	-	-
	Jumlah	103	94	92

*) Data dari Bagian Umum Januari 2023

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Golongan :

No	Golongan	2020	2021	2022
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	28	21	16
3	Golongan III	60	58	58
4	Golongan IV	15	15	18
	Jumlah	103	94	92

*) Data dari Bagian Umum Januari 2023

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Eselon :

No	Eselon	2020	2021	2022
1	Eselon II	6	7	5
2	Eselon III	9	8	9
3	Eselon IV	25	25	21
4	Fungsional	-	5	6
5	Pelaksana	63	49	51
	Jumlah	103	94	92

*) Data dari Bagian Umum Januari 2023

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Singkawang selama tahun



**SINGKAWANG
HEBAT!**



*Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022*

2022 bersumber dari dana APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD Tahun 2022 sebesar **Rp. 69.957.200.400,00** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 69.185.534.790,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 771.665.610,00** Sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
APBD Setda Kota Singkawang TA. 2022

Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2022
Belanja Operasi	69.185.534.790,00
- Belanja Pegawai	12.524.968.720,00
- Belanja Barang dan Jasa	17.050.394.120,00
- Belanja Hibah	38.154.171.950,00
- Belanja Bantuan Sosial	1.456.000.000,00
Belanja Modal	771.665.610,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.582.900,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.525.000,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.557.710,00
Jumlah	69.957.200.400,00

**) Data dari Bagian Keuangan Januari 2023*

6. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Sekretariat Daerah Kota Singkawang telah menempati gedung yang terletak di Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang dengan luas 8350.9 m² yang terdiri dari 2 lantai antara lain :

Lantai 1 terdiri dari Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum (Ass.III), Ruang Kerja Bagian Administrasi Pembangunan, Ruang Kerja Bagian Umum, Ruang Kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Ruang Kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ass.II), Ruang Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat, Ruang Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Ruangan TCM, Ruang Kerja Auditor (Inspektorat), Ruangan Basement, Ruangan Olahraga, Ruang Kerja Bagian Umum, Ruangan Laksi, Ruangan Bermain Anak-anak, Ruangan Bumi Bertuah, Ruangan Transit, Ruang Kerja Dharma Wanita Kota Singkawang.

Lantai 2 terdiri dari Ruang Kerja Walikota, Ruang Rapat Walikota, Ruang Kerja Wakil Walikota, Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Ruang Kerja Staf Ahli, Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Ass.I), Ruang Kerja Bagian Pemerintahan, Ruang Kerja Bagian Hukum, Ruang Kerja Bagian



Organisasi, Ruang Kerja Bagian PBJ, Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Balairung Kantor Walikota Singkawang.

b. Kendaraan

Tabel 1.5
Jumlah Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	2020	2021	2022
1	Kendaraan Roda Dua	63	46	47
2	Kendaraan Roda Empat	29	24	21
3	Kendaraan Roda Enam/Bus	1	0	0
4	Mobil Pick Up	6	3	3

*) Data dari Bagian Umum Januari 2023

Dari data tabel diatas diketahui bahwa tahun 2022 adanya penambahan jumlah kendaraan yaitu kendaraan roda dua sekitar 1 unit, kendaraan roda empat adanya pengurangan 3 unit dikarenakan 1 hibah ke Panti Werdha Sinar Abadi Singkawang, 1 hibah ke BPKS Widya Bhakti Singkawang dan 1 Penjualan melalui Lelang, kendaraan roda enam dan mobil pick up tidak adanya penambahan dan pengurangan.

c. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor lainnya :

Tabel 1.6
Jumlah Sarana Perlengkapan Kantor

No	Sarana	2020	2021	2022
1	Komputer/PC	221	128	137
2	Laptop	87	39	42
3	Proyektor	32	31	31
4	Printer	308	169	169
5	Genset	6	5	5
6	AC	339	332	332
7	Kursi Kerja	251	251	238
8	Meja Kerja	578	578	518

*) Data dari Bagian Umum Januari 2023



**SINGKAWANG
HEBAT!**



Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa adanya penambahan dan pengurangan aset. Adapun aset yang bertambah yaitu komputer sebanyak 9 unit, Laptop sebanyak 3 unit. Sedangkan aset yang berkurang yaitu kursi kerja sebanyak 13 unit rusak berat/pindah ke asset lain-lain, Meja Kerja sebanyak 60 unit rusak berat/pindah ke asset lain-lain, untuk asset yang tidak adanya perubahan yaitu Proyektor, Pinter, Genset dan AC.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari Isu-isu strategis daerah, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik
2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Singkawang;
4. Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah.



**SINGKAWANG
HEBAT!**



*Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pagu yang bersifat indikatif.

Tujuan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur secara objektif.
2. Suatu dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan.
3. Sebagai dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
4. Sebagai suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi dan capaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan stakeholder secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi lewat data di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022, adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 adalah :

**SINGKAWANG
HEBAT 2022 !**

Visi tersebut merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.



2. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon, 2006 : 97). Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi Sumber Daya Alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung Sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

Adapun peran serta Sekretariat Daerah pada pencapaian Misi Walikota dan Wakil walikota terpilih adalah :

“ Misi ke 4 yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi Komunikasi dan informasi ”

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kota Singkawang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.



**SINGKAWANG
HEBAT!**



Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;**
- 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.**

b. Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Meningkatnya implementasi kebijakan daerah;

Tujuan, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat. 2. Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah.
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Nilai LPPD
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Nilai SAKIP
	4. Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	6. Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti 7. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. PENJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan pernyataan dari pimpinan instansi yang lebih rendah kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang ditentukan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujudlah kinerja yang berkesinambungan.



Perjanjian Kinerja juga merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	95%
		2. Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	BB
		3. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah.	90
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Nilai LPPD	ST
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Nilai SAKIP	BB



**SINGKAWANG
HEBAT!**



*Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022*

4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	6. Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti	75%
		7. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan sesuatu yang menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja yaitu dengan menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai sesuai dengan isi yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sesuai dengan hasil pengukuran adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indek Kepuasan Masyarakat	95%	85,04%	89,51%
		2. Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	BB	A-	120,22%
		3. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	90	83,33	92,58%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Nilai LPPD	ST	-	-
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Nilai SAKIP	BB	B	61,86
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	6. Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti	75%	76%	101,33%
		7. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	90%	90%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada indikator *Indek Kepuasan Masyarakat* capaian sebesar 89,51% (target tidak tercapai), indikator *Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik* dengan capaian sebesar 120,22% (target tercapai), indikator *Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah* dengan capaian 92,58% (target tidak tercapai), indikator *Nilai LPPD* tidak ada data karena nilai LPPD belum keluar dari Kemendagri, indikator *Nilai SAKIP* dengan capaian sebesar 61,86% (target tidak tercapai), indikator *Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti* dengan capaian sebesar 101,33% (target sudah tercapai) dan indikator *Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan* dengan capaian sebesar 90% (target tidak



tercapai). Adapun dari tabel diatas akan dijelaskan satu persatu berdasarkan analisis capaian setiap indikator kinerja sasaran.

Sasaran # 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
-------------	--

Sasaran ini bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik secara optimal kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator kinerja utama yaitu :

1. Indikator # Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai indikator tersebut didukung oleh 1 program prioritas yaitu :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - Penataan Organisasi dengan Subkegiatan :
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	85,04%	89,51

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran *meningkatkan kualitas pelayanan publik* dengan indikator *indeks kepuasan masyarakat*, realisasi sebesar 85,04% dari target yang ditetapkan sebesar 89,51. Dengan demikian capaian tahun ini adalah sebesar 89,51% (Baik).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



Tabel 1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	83,74	93,04	92,50	84,94	91,83	95	85,04	89,51

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi kinerja sebesar 1,2 poin dari tahun sebelumnya dan capaian kinerja terjadi penurunan 1,21 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 juga terjadi kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 0,1 poin dari tahun sebelumnya dan terjadi penurunan pada capaian kinerja sebesar 2,32 poin dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pada sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat* menunjukkan trend positif pada realisasi kinerja dan trend negatif pada capaian kinerja.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target 2022	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	95%	89,51

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan tahun ini adalah nilai IKM sebesar 85% dari target jangka menengah rencana strategis yaitu nilai IKM sebesar 95%. Dengan demikian capaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini adalah sebesar 89,41 %.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran *meningkatkan kualitas pelayanan publik* dengan indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat* belum mencapai target yang diperjanjikan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- a. Target nilai IKM pada Renstra terlalu tinggi sehingga susah tercapai;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan;



- c. Adanya perbedaan persepsi dari beberapa perangkat daerah terkait peran dan fungsi survey kepuasan masyarakat;
- d. Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan dan tindaklanjut survey kepuasan masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan dalam mengantisipasi kendala dan hambatan untuk pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- a. Menurunkan target nilai IKM untuk Renstra pada periode berikutnya;
- b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada TAPD dari evaluasi hasil IKM untuk dapat dianggarkan dan menjadi target kinerja perangkat daerah;
- d. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia terkait pelayanan publik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik (Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	135.501.400	134.485.450	99,25	89,51	n/a
		Rata-rata			99,25	89,51	n/a

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,25% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 89,51%. Dengan demikian pada sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat* menunjukkan tidak ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :



Tabel 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan			Predikat Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE UNIT KERJA DENGAN NILAI IKM KATEGORI BAIK	80%	84,93	106,16	Sangat Baik
	Kegiatan Penataan Organisasi	Cakupan pelaksanaan penataan organisasi	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
	Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	100%	Sangat Baik

Dari data table diatas menunjukan bahwa capaian kinerja program/ kegiatan/subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama di atas secara umum sudah menunjukan kinerja sangat baik dengan capaian 100%. Dengan demikian pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan pada kinerja sasaran ini berhasil.

2. Indikator #Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk Mencapai indikator “Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik” tersebut didukung oleh 1 program prioritas yaitu :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - Penataan Organisasi dengan Subkegiatan :
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2. Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan public	BB	A-	120,22

Berdasarkan data atas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran *meningkatkan kualitas pelayanan publik* dengan indikator *nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik*, realisasi A- (dengan nilai poin 4,22) dari target yang ditetapkan yaitu B (dengan nilai poin 3,51). Dengan demikian capaian tahun ini adalah sebesar 120,22%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2. Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	B	B-	91,45	B	B	103,98	BB	A-	120,22

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,43 poin dari tahun sebelumnya dan capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 12,53% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 0,56 poin dari tahun sebelumnya dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 16,24% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pada sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* indikator *Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik* menunjukkan trend positif pada realisasi kinerja dan capaian kinerja.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target 2022	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2. Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	A-	B	120,22

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan tahun ini adalah nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik A- (4,22 poin) dari target jangka menengah rencana strategis yaitu nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik B (3,51 poin). Dengan demikian capaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini adalah sebesar 120,22 %.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Pada sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* dengan indikator *Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik* sudah mencapai target yang diperjanjikan. Adapun upaya yang sudah dilaksanakan dalam mencapai keberhasilan ini adalah :

- Peningkatan tindak lanjut SKM;
- Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- Peningkatan inovasi pelayanan kepada masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik (Indikator 2: Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	115.496.800	113.956.972	98,66	120,22 %	21,56
Rata-rata					98,66	120,22	21,56

Dari tabel di dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 98,66% dan capaian kinerja sasaran sebesar 120,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pada sasaran ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya sebesar 21,56%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan			Predikat Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN	95%	100%	111,11	SANGAT BAIK
	Kegiatan Penataan Organisasi	Cakupan pelaksanaan penataan organisasi	100%	100%	100	Sangat Baik
	Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Sangat Baik

Dari data table diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama di atas secara umum sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian



100%. Dengan demikian pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan pada kinerja sasaran ini berhasil.

3. Indikator # Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah

Indikator kinerja utama ketiga yaitu “*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah*”. Untuk Mencapai indikator tersebut didukung oleh 2 program prioritas yaitu :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Subkegiatan :
 - Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Subkegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran.
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Subkegiatan :
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Subkegiatan;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Subkegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Subkegiatan :



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Subkegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Subkegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Subkegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat :
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga kepala Daerah;
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan Subkegiatan :
 - Fasilitasi Keprotokolan;
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
- ❖ Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan:
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan Subkegiatan:
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	90	83,33	92,58

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran *meningkatnya kualitas pelayanan publik* dengan indikator *Indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah*, realisasi nilai sebesar 83,33 dari target yang ditetapkan nilai sebesar 90,58. Dengan demikian capaian tahun ini adalah sebesar 92,58% (Sangat Baik).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	78	81,95	105,06	85	82,13	96,62	90	83,33	92,58

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 0,18 poin dari tahun sebelumnya dan penurunan pada capaian kinerja sebesar 8,44 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 juga terjadi kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 1,2 poin dari tahun sebelumnya dan terjadi penurunan pada capaian kinerja 4,04 poin dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pada sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* indikator *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan setda* menunjukkan trend positif pada realisasi kinerja dan trend negatif pada capaian kinerja.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



Tabel 1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target 2022	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	83,33	90	92,58

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi nilai IKM Sekretariat Daerah sampai dengan tahun ini adalah sebesar 83,33. Sedangkan target jangka menengah rencana strategis yaitu sebesar 90. Dengan demikian capaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini adalah sebesar 92,58 %.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* dengan indikator *Indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah* tidak mencapai target yang diperjanjikan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Target nilai IKM pada Renstra telalu tinggi sehingga susah tercapai;
- Kurangnya partisipasi pegawai di lingkungan Setda dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan dalam mengantisipasi kendala dan hambatan untuk pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Menurunkan target nilai IKM untuk Renstra pada periode berikutnya;
- Memberikan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Setda tentang pentingnya melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kuliatas Pelayanan publik (Indikator 3 : Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten / Kota	25.642.700.405	24.628.275.753	96,04	92,58	n/a
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	40.751.517.559	39.638.812.897	97,26		
		Rata-rata			96,65	92,58	n/a



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 96,65% dan capaian kinerja sasaran sebesar 92,58%. Dengan demikian bahwa pada sasaran ini menunjukkan tidak ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan			Predikat Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KOTA	CAKUPAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN	10 Jenis Pelayanan an	10 Jenis Pelayanan an	100%	Sangat Baik
		PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	300 Dokumen	300 Dokumen	100	Sangat Baik
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	120 Orang	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	21 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	100	Sangat Baik
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Sangat Baik



**SINGKAWANG
HEBAT!**



**Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022**

Sub.Keg Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	Sangat Baik
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
Sub. Keg penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Sangat Baik
Sub. Keg fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	Sangat Baik
Sub.Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Jenis/Item	4 Jenis/Item	100	Sangat Baik
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100	Sangat Baik
Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	100	Sangat Baik



**SINGKAWANG
HEBAT!**



**Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022**

	Operasional atau Lapangan					
	Sub.Keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	60 Unit	100	Sangat Baik
	Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100	Sangat Baik
	Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100	SANGAT BAIK
	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Sangat Baik
	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Sangat Baik
	Sub.Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Sangat Baik
	Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100	SANGAT BAIK
	Sub.Keg. Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
	Kegi. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Sangat Baik
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pembinaan dan Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat	30	30	100%	Sangat Baik
		Persentase Dana Bantuan Hibah Dan Bansos Yang Direalisasikan	93%	96,3	103%	Sangat Baik



Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Sangat Baik
Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
Sub.Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik

Dari data table diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja program/ kegiatan/subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama di atas secara umum sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 100% dan berhasil. Namun pada capaian kinerja program/ kegiatan/subkegiatan *Persentase dana Bantuan Hibah dan Bansos yang Direalisasikan* melebihi target sebesar 3 point. Sehingga menunjukkan predikat kinerja sangat baik dalam kegiatan dana bantuan hibah dan bansos.

Sasaran # 2	<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>
-------------	--

Sasaran ini bertujuan agar meningkatnya kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 1 indikator kinerja utama yaitu “*Nilai LPPD*”. Sedangkan untuk mencapai indikator tersebut didukung oleh 1 program prioritas antara lain :

- ❖ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan :
 - Administrasi Tata Pemerintahan dengan Subkegiatan :
 - Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Subkegiatan :
 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :



**SINGKAWANG
HEBAT!**



**Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2022**

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Nilai LPPD	ST	-	-

Dari tabel di atas belum bisa dijelaskan analisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dikarenakan data capaian kinerja Nilai LPPD belum dikeluarkan oleh Kemendagri.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Nilai LPPD	ST	-	ST	-	ST	-	ST	-	-

Dari tabel di atas belum bisa dijelaskan analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dikarenakan data capaian kinerja Nilai LPPD belum dikeluarkan oleh Kemendagri.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Capaian (%)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Nilai LPPD	-	ST	-



Dari tabel di atas belum bisa dijelaskan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dikarenakan data capaian kinerja Nilai LPPD belum dikeluarkan oleh Kemendagri.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran *meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah* dengan indikator *Nilai LPPD* belum bisa diketahui untuk hasil capaian kinerja. Meskipun demikian tetap akan disampaikan hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini yaitu :

- a. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan pemerintah pusat berubah sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan;
- b. Kurangnya sosialisasi dalam pengisian IKK dari Pemerintah Pusat
- c. Peran perangkat daerah belum maksimal dalam menyampaikan data yang berhubungan dengan kinerjanya;
- d. Sehubungan dengan kondisi sekarang yaitu bencana nasional covid-19 di tahun 2022 sehingga banyak pemotongan anggaran di semua daerah sehingga kurang maksimalnya dalam pencapaian target kinerja;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator : Nilai LPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.522.574.000	1.351.717.641	88,77	-	n/a
Rata-rata					88,77	-	n/a

Dari tabel di atas belum bisa dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan data capaian kinerja Nilai LPPD belum keluar dari Kemendagri.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :



Tabel 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan			Predikat Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Pemerintah Kota Singkawang	ST	-	-	-
	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Sangat Baik
	Keg. Fasilitas Kerjasama Daerah	Cakupan fasilitas kerjasama daerah	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik

Dari data table diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama di atas secara umum sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 100% dan berhasil.

Sasaran # 3	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</i>
-------------	--

Sasaran ini bertujuan agar terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu *Nilai SAKIP*. Sedangkan untuk mencapai indikator tersebut didukung oleh 2 program prioritas antara lain :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:
 - Penataan Organisasi dengan Subkegiatan :
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- ❖ Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Kegiatan :
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan Subkegiatan :
 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan;
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - Pengadaan Barang dan Jasa dengan Subkegiatan :
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :



1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Nilai SAKIP	BB	B	88,36%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran *Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah* dengan indikator *Nilai SAKIP*, realisasi B (dengan nilai 61,86) dari target yang ditetapkan yaitu B (dengan nilai 70,01). Dengan demikian capaian tahun ini adalah sebesar 88,36% (Baik). Data diatas merupakan capaian nilai SAKIP tahun 2021 yang menjadi bahan evaluasi tahun 2022.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Nilai SAKIP	BB	B	85,74	BB	B	86,60	BB	B	88,36

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 tidak ada kenaikan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya dan capaian kinerja terjadi kenaikan sebesar 0,86 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 juga tidak ada kenaikan pada realisasi kinerja dari tahun sebelumnya sedangkan capaian kinerja terjadi kenaikan sebesar 1,76 poin dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pada sasaran *Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah* indikator *Nilai SAKIP* menunjukkan stagnan pada realisasi kinerja dan trend positif pada capaian kinerja.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



Tabel 1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Capaian (%)
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Nilai SAKIP	B	BB	88,36

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan tahun ini adalah nilai SAKIP B (nilai 61,86) dari target jangka menengah rencana strategis yaitu nilai SAKIP B (nilai 70,01). Dengan demikian capaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini 88,36%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran *meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah* dengan indikator *Nilai SAKIP* tidak mencapai target yang diperjanjikan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sesuai dengan hasil rekomendasi dari KemenPAN-RB adalah :

1. Pemerintah Kota Singkawang telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun demikian, terhadap rekomendasi yang diberikantahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum menampakan kemajuan yang signifikan pada penerapan SAKIP di Kota Singkawang dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Kota Singkawang adalah :
 - a) Implementasi SAKIP masih di fokuskan pada tingkat Pemerintah Kota Singkawang saja, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah belum optimal dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil/outcome sehingga keberhasilan capaian kinerja belum sepenuhnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
 - b) Penjabaran kinerja dari level Pemerintah Kota Singkawang sampai ke jabatan paling rendah di implementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum berdasarkan kerangka berfikir logis (logical framework) sehingga belum tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang;
 - c) Masih terdapat sebagian program dan kegiatan yang belum mendukung secara langsung terhadap pencapaian strategis PD yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan berpotensi terjadinya inefisiensi dan inefektifitas dalam penggunaan anggaran;
 - d) Laporan Kinerja yang telah disusun masih perlu disempurnakan, terutama pada kedalaman analisis atas capaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan dan peningkatan kinerja. Selain itu laporan kinerja di beberapa PD masih banyak



- mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada analisis capaian kinerja;
- e) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya dilakukan secara kolaboratif sehingga belum mampu memberikan rekomendasi yang spesifik. Hal tersebut mengakibatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan PD secara berkelanjutan.

Upaya yang dilaksanakan dalam mengantisipasi kendala dan hambatan untuk pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Melakukan penguatan terhadap tim SAKIP dengan melaksanakan koordinasi serta evaluasi terhadap langkah-langkah dalam perbaikan SAKIP Kota Singkawang;
- Melaksanakan koordinasi dengan tim KemenPAN-RB serta Propinsi;
- Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan terhadap pengelola SAKIP Kota Singkawang;
- Berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Menindaklanjuti hasil rekomendasi KemenPAN-RB tentang perbaikan beberapa komponen penilaian LAKIP;
- Penguatan komitmen dan integritas para pimpinan, pengelola dan para pelaksana kegiatan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah (Indikator : Nilai SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	110.424.713	109.245.150	98,93	88,36	n/a
		Program Perekonomian dan Pembangunan	552.610.723	535.995.430	96,99		
	Rata-rata				97,96	88,36	n/a

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini tidak ada tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



**SINGKAWANG
HEBAT!**



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan			Predikat Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	NILAI SAKIP KOMPONEN PELAPORAN KINERJA	10,50	10,87	103,52	SANGAT BAIK
	Keg. Penataan Organisasi	Cakupan pelaksanaan penataan organisasi	100 %	100 %	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Sangat Baik
2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	NILAI SAKIP KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA	17,50	14,58	83,31	BAIK
		PERSENTASE PENYERAPAN APBD	93%	%	%	BAIK
	Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pelaksanaan administrasi pembangunan	100%	100%	100	Baik
	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100	Sangat Baik
		PERSENTASE KEBERHASILAN PELAKSANAAN TENDER	87%	100%	114,94%	SANGAT BAIK
	Keg. Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kepwako SHBJ yang dikeluarkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah penyedia yang diberikan pelatihan LPSE	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah perkara yang mendapat pendampingan hukuma	30 Orang	30 Orang	100	Sangat Baik

Dari data table diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja program/ kegiatan/subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama di atas secara umum sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 100% dan berhasil, namun ada 1 indikator subkegiatan yang mengalami kegagalan dengan capaian kinerja kurang yaitu pada Sub.Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa indikator *Jumlah ASN yang melaksanakan pelatihan PBJ* dengan capaian 40% (Kurang).

Sasaran # 4	<i>Meningkatnya implementasi kebijakan daerah</i>
-------------	---

Untuk mewujudkan sasaran ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :



1. Indikator # Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai indikator ini didukung oleh 1 program prioritas yaitu :

- ❖ Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Kegiatan :
 - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan Subkegiatan:
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan Subkegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	6. Persentase Kebijakan daerah yang ditindaklanjuti	75%	76%	101,33

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran *Meningkatnya implementasi kebijakan daerah* dengan indikator *Persentase Kebijakan daerah yang ditindaklanjuti*, realisasi sebesar 76 % dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Dengan demikian capaian tahun 2022 adalah sebesar 101,33% (Sangat Baik).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	6. Persentase Kebijakan daerah yang ditindaklanjuti	55%	90%	163,64	65%	75,19%	115,67	75	76%	101,33



Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 14,81% dari tahun sebelumnya dan terjadi kenaikan pada capaian kinerja sebesar 47,97% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 terjadi kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 0,81% dari tahun sebelumnya dan pada capaian kinerja juga mengalami penurunan sebesar 14,27% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pada sasaran *Meningkatnya implementasi kebijakan daerah* dengan indikator *Persentase Kebijakan daerah yang ditindaklanjuti* menunjukkan adanya pergerakan (naik/turun) pada realisasi kinerja dan capaian kinerja.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Capaian (%)
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	6. Persentase Kebijakan daerah yang ditindaklanjuti	76%	75%	101,33

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan tahun ini adalah sebesar 76% dari target jangka menengah rencana strategis yaitu sebesar 75%. Dengan demikian capaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini adalah sebesar 101,33%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran *Meningkatnya implementasi kebijakan daerah* dengan indikator *Persentase Kebijakan daerah yang ditindaklanjuti* sudah mencapai target yang diperjanjikan. Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- a. Membangun kerjasama tim dengan OPD pemrakarsa dalam proses percepatan tindak lanjut Perda;
- b. Adanya peningkatan SDM dalam penyusunan kebijakan daerah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :



Tabel 1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah (Indikator 1: Persentase produk hukum daerah yang ditindaklanjuti)	Program Perekonomian dan Pembangunan	405.003.300	385.134.509	95,09	101,33	6,24
Rata-rata					95,09	101,33	6,24

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,09% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,33% menunjukkan bahwa pada sasaran ini adanya tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya sebesar 6,24%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan			Predikat Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE BUMD YANG BERKATEGORI SEHAT	100%	100%	100	SANGAT BAIK
		PERSENTASE KEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100	SANGAT BAIK
	Keg Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Baik
	Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan pemantauan kebijakan sumber daya air	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik



Dari data table diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja program/ kegiatan/subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama di atas secara umum sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 100% dan berhasil.

2. Indikator # Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk mencapai indikator ini didukung oleh 1 program prioritas yaitu :

- ❖ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan:
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan Subkegiatan :
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	7. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	90%	90%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran *Meningkatnya implementasi kebijakan daerah* dengan indikator *Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan*, realisasi sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian tahun 2022 adalah sebesar 90% (Sangat Baik).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



Tabel 1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	7. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	72%	90%	90%	82,92 %	99,91 %	100%	90%	90%

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 10,92% dari tahun sebelumnya dan juga terjadi kenaikan pada capaian kinerja sebesar 9,91% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 terjadi kenaikan pada realisasi kinerja sebesar 7,08% dari tahun sebelumnya dan juga terjadi penurunan pada capaian kinerja sebesar 9,91% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pada sasaran *Meningkatnya implementasi kebijakan daerah* dengan indikator *Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan* menunjukkan adanya pergerakan trend positif pada realisasi kinerja dan penurunan pada capaian kinerja.

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Capaian (%)
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah	7. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	90%	100%	90%

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan tahun ini adalah sebesar 90% dari target jangka menengah rencana strategis yaitu sebesar 100%. Dengan demikian capaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini adalah sebesar 90%.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran *Meningkatnya implementasi kebijakan daerah* dengan indikator *Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan* belum mencapai target yang diperjanjikan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :



- Raperda yang ditetapkan tidak sesuai dengan Propem Perda yang ditetapkan DPRD;
- Produk hukum masih dalam proses tahapan pengkajian dan pembentukan regulasi daerah yang dilaksanakan secara berjenjang dari perangkat daerah pengusul Raperda ke Wali Kota untuk penetapannya.
- Meningkatnya target renstra di tahun 2022 dari 90% menjadi 100%.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Menyesuaikan SOP yang selanjutnya membuat surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan hasil kejian dari Bagian Hukum untuk segera ditindaklanjuti;
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah pengusul Raperda untuk menyusun Naskah Akademik dan Raperda.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya implementasi kebijakan daerah (Indikator 2: Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	730.268.500	713.014.190	97,63	90	n/a
Rata-rata					97,63	90	n/a

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,63% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 90% menunjukkan bahwa pada sasaran ini tidak adanya tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan			Predikat Kinerja
			Target	Realisasi	%	



1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIHASILKAN TERHADAP JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	100%	100%	100	SANGAT BAIK
	Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	100%	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Produk Hukum	500 Produk Hukum	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	100	Sangat Baik
	Sub.Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	500 Produk Hukum	500 Produk Hukum	100	Sangat Baik

Dari data table diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja program/ kegiatan/subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama di atas secara umum sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 100% dan berhasil.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 didukung oleh 3 program yang sudah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi sebesar Rp. 24.985.963.325,- dari target anggaran sebesar Rp. 25.994.726.318,- dengan capaian sebesar 96,08%;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi sebesar Rp. 41.703.544.728,- dari target anggaran sebesar Rp. 43.004.360.059,- dengan capaian sebesar 96,97%;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan realisasi sebesar Rp. 921.129.939,- dari target anggaran sebesar Rp. 957.614.023,- dengan capaian sebesar 96,19%;

Dari total keseluruhan maka realisasi sebesar Rp.67.610.637.992,- dari total anggaran sebesar Rp.69.966.097.400,- dengan capaian sebesar 96,64%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	25.994.726.318	24.985.963.325	96,11
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	43.004.360.059	41.703.544.728	96,97
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	957.614.023	921.129.939	96,19
TOTAL		69.957.200.400	67.610.637.992	96,64



**SINGKAWANG
HEBAT!**



BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah sudah cukup berhasil karena dari 7 (tujuh) indikator yang ditargetkan ada 3 (tiga) indikator yang memenuhi target yang ditetapkan, 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan sedangkan 1 (satu) indikator tidak ada data pencapaian.

Untuk menghadapi kendala dimasa akan datang Sekretaris Daerah akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja baik dari indikator sasaran, program maupun kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah:

1. Melakukan evaluasi setiap triwulan terhadap rencana aksi capaian kinerja program dan kegiatan;
2. Mempetakan program dan kegiatan yang mengalami kendala/permasalahan;
3. Mencarikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada baik dari eksternal maupun internal;
4. Selalu memotivasi kepada pegawai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. Meningkatkan kualitas, perbaikan kerja dan akuntabilitas kinerja pegawai;
6. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan Setda Kota Singkawang;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Kota Singkawang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja ini di sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan capaian kinerja dimasa yang akan datang.